



E-journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)

KETIMPANGAN EKONOMI WILAYAH DI INDONESIA : PERSPEKTIF ANALITIS PENGARUH EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN DEMOKRASI

Devita Sari¹, Arivina Ratih Yulihar Taher², Prayudha Ananta³, I Wayan Suparta⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lampung

Informasi Naskah

Update Naskah:

Dikumpulkan: 23 April 2025

Diterima: 28 April 2025

Terbit/Dicetak: 30 April 2025

Keywords:

Regional Economic Inequality, Investment,
Economic Growth, Road Infrastructure,
Democracy

Abstract

Regional economic inequality in Indonesia is still a major challenge in national development. This study is purposed to analyze the effect of investment, economic growth, road infrastructure, and democracy on regional economic inequality in Indonesia during the period 2018-2023. The data used is secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) which is processed using panel data regression with FEM approach. The output showed that the variables of investment, economic growth, road infrastructure, and democracy partially had a significant effect on regional economic inequality. Simultaneously, the variables of investment, economic growth, road infrastructure, and democracy have a significant effect on regional economic inequality in Indonesia. The R^2 of 0.989608 indicates that 98.96 percent of the variation in regional economic inequality can be explained by the independent variables in the model, while the 1.04 percent is influenced by other factors. Based on these results, strategic efforts are needed in the form of equitable investment between regions, strengthening fiscal decentralization, accelerating road infrastructure development in underdeveloped regions, and improving the governance and quality of regional public services.

A. PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah besar hingga saat ini yang dirasakan di banyak negara dunia. Berdasarkan surveinya Pew Research Center (2024) di 36 negara termasuk Indonesia, lebih dari setengah responden atau 54 % menganggap ketimpangannya ekonomi orang kaya dan miskin menjadi masalah yang amat besar di negaranya dan Sebanyak 30% lainnya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan masalah yang cukup besar (Wike et al., 2025).

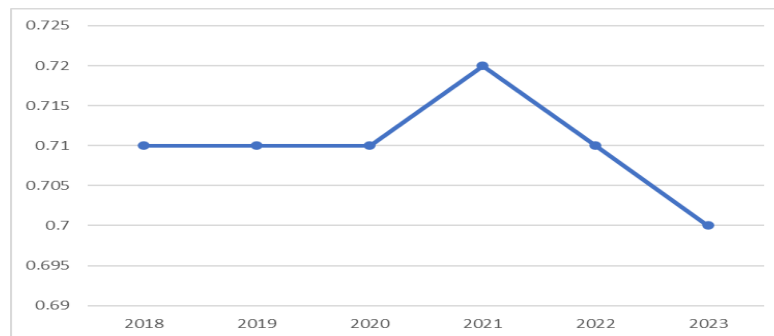
Indonesia adalah negara dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang relatif tinggi. Hal ini terlihat dalam RPJM 2015-2019 yang dirancang tahun 2014 yang menyatakan ketimpangan pembangunannya antar wilayah di Indonesia cukup menjadi tantangan yang wajib diatasi dalam perencanaan pembangunan dimasa depan. Apabila tidak segera diatasi, ketimpangan ini dapat berdampak ke kehidupan sosialnya masyarakat. Oleh karena itu, usaha pembangunan pro daerah tertinggal menjadi kewajiban (RPJM, 2014).

* Corresponding Author.

Devita Sari, e-mail : devitasari.madi@gmail.com

Selain itu, dapat dilihat juga pada RPJMN 2020-2024 yang dirancang pada tahun 2019 yang diarahkan pada upaya mengatasi isu strategis utama yaitu ketimpangan pembangunan antarwilayah (RPJMN, 2019). Dalam kebijakan pembangunan RPJMN 2020-2024, Indonesia telah memutuskan tujuh wilayah pembangunan untuk: 1). Sumatera, 2). Jawa Bali, 3). Nusa Tenggara, 4). Kalimantan, 5). Sulawesi, 6). Maluku, dan 7). Papua (Fahma & Hendarto, 2022).

Satu indikator pengukuran ketimpangan pembangunan ialah indeks Williamson yang menunjukkan ketidakmerataan ekonomi wilayah berdasarkan PDRB perkapita dan jumlah penduduk. Rentang indeks ini yakni 0 hingga 1. Nilai mendekati 0 memperlihatkan ketimpangan pembangunan wilayah yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang merata di setiap wilayah. Sebaliknya, nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan pembangunannya tinggi dan pertumbuhan ekonomi tidak merata antar wilayah.

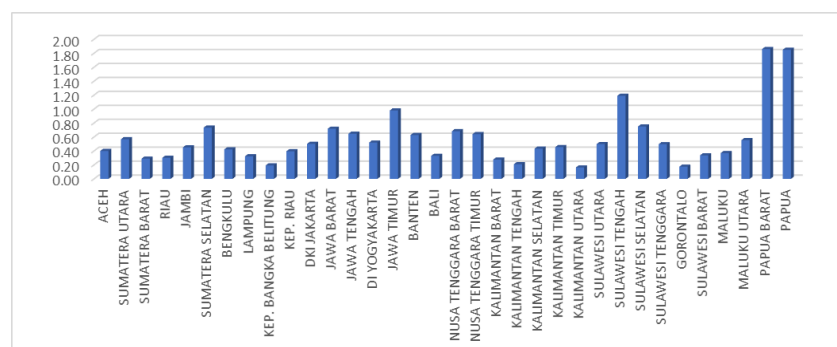


Sumber : Badan Pusat Statistik 2018-2023 (Data di Olah)

Gambar 1 Indeks Williamson Indonesia 2018-2023

Gambar 1 Tentang indeks williamosn di Indonesia (2018-2023) menunjukkan di Indonesia, ketimpangan pembangunan antar wilayahnya begitu tinggi selama periode 2018-2023, dengan nilai indeks Williamson yang konsisten berada pada kisaran 0.70 – 0.72. menurut kreteria ketimpangan nilai indeks Williamson antara 0.7 – 1 menunjukkan ketimpangan pembangunan yang tinggi (Karim et al., 2023).

Setiap daerah di Indonesia menghadapi permasalahan ketimpangan pembangunan dan tidak ada satu pun wilayah yang sepenuhnya bebas dari ketimpangan pembangunan. Ini tampak dari perbedaan nilai indeks Williamson di berbagai wilayah di Indonesia, dimana beberapa wilayah menunjukkan ketimpangan pembangunan yang tinggi, sementara wilayah lainnya relatif lebih merata. Nilai indeks Williamson yang tinggi berarti ketimpangan antarwilayah kini menjadi masalah serius duimana perlu mendapatkan perhatiannya pemerintah. Ketimpangan di Indonesia masih memerlukan perbaikan kebijakan daerah untuk mengurangi ketimpangan wilayah.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018-2023 (Data di Olah)

Gambar 2 Rata-Rata indeks Williamson Per Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023

Gambar 2 Tentang rata-rata ketimpangan ekonomi wilayah per provinsi di Indonesia tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup jelas antar provinsi terkait ketimpangan pembangunan. Beberapa provinsi dengan ketimpangan pembangunan yang tertinggi adalah Papua 1.85, Papua Barat sebesar 1.86, di ikuti oleh Sulawesi Tengah sebesar 1.19 dan Jawa Timur sebesar 0.98. Nilai indeks Williamson yang tinggi ini menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah masih menjadi masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan pembangunan seperti memperluas pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sebaliknya, provinsi dengan ketimpangan pembangunan yang rendah adalah Kalimantan Utara sebesar 0.16, diikuti provinsi Gorontalo sebesar 0.18, dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0.19, menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dan potensi pembangunan di wilayah-wilayah tersebut lebih merata.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi ialah proses naiknya penerimaan total dan per kapita yang berlangsung di jangka panjang sembari mempertimbangkan pertumbuhan penduduk juga perubahan mendasar mengenai struktur ekonomi, pemerataan pendapatan disuatu negara serta peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh (Bapedda, 2017).

Terdapat tiga tujuan pembangunan antara lain (Todaro & Smith, 2012).

1. Meningkatkan aksesibilitas dan memperluas jaringan distribusi untuk barang-barang kebutuhan termasuk makanan, perumahan, perawatan Kesehatan, dan kemandirian guna mencukupi kebutuhan dasarnya manusia.
2. Mendorong naiknya standar hidup yang tak sekadar melalui pertumbuhan pendapatan tapi ini pun dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan kualitas Pendidikan dan memprioritaskan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Upaya-upaya ini berkontribusi pada kesejahteraan material dan menumbuhkan rasa harga diri individu dan nasional.
3. Memperluas keterjangkauan opsi ekonomi-sosial yang tersedia untuk individu/masyarakat, secara tidak langsung membuat mereka mandiri dan terbebas dari rasa ketergantungan kepada individu dan negara-bangsa serta mengatasi hambatan yang menyebabkan ketidaktahuan dan kesulitan.

Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Ketimpangan ekonomi wilayah di definisikan sebagai perbedaan atau ketidak merataan pembangunan antar daerah di satu Negara. Perbedaan ini memengaruhi kapasitas masing-masing daerah dalam mendorong proses pembangunan yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan. Akibatnya, memunculkan klasifikasi wilayah menjadi daerah maju dan daerah yang kurang berkembang (Suroso, 2023).

Menurutnya Sjafrizal (2014) ada determinan ketimpangan pembangunan wilayah yaitu tak samanya kekayaan SDA, kondisi geografis, belum lancarnya mobilitas produk/jasa, sentra ekonomi, juga alokasinya data pembangunan daerah.

Investasi

Investasi adalah proses menempatkan dana untuk mendapat keuntungan di kemudian hari (Sudarmadji, 2022). Berdasarkan asal modal dan investornya, investasi langsung dibagi dua: 1) PMDN yakni berinvestasi di domestik dimana suntikan dananya pun dari orang domestik; 2) PMA yakni investasinya dana orang asing untuk bisnis di Indonesia (UU No. 25 2007).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan kapasitasnya produksi perekonomian dimana direpresentasikan oleh naiknya penerimaan nasional. Pertumbuhan ini merujuk ke sejauh manakah

ekonomi bias memproduksi barang/jasa, juga memperbanyak penerimaan masyarakat (Todaro & Smith, 2012).

Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memfasilitasi mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Menurut UU No. 38 (2004), jalan yakni sarana darat meliputi semua jalan termasuk bangunan pelengkap untuk lalu lintas umum.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif guna menganalisis pengaruhnya variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Data riset ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari publikasi BPS. Teknik analisisnya yakni data panel yang mencakup 34 Provinsi di Indonesia pada 2018-2023. Analisis data menggunakan perangkat lunak Eviews 12.

Pengukuran ketimpangannya ekonomi wilayah dapat mengaplikasikan perhitungan Indeks Williamsson. Indeks Williamsson yang menunjukkan ketimpangan ekonomi wilayah berdasarkan PDRB perkapita dan jumlahnya penduduk. Rumus indeks Williamsson (Anwar et al., 2023)

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 f_i / n}}{\bar{Y}}$$

Keterangan :

IW : Indeks Williamsson

Y_i : PDRB per kapita daerah kab/kota di tiap provinsi di Indonesia

$\bar{Y}$: PDRB per kapita rerata daerah kab/kota di tiap wilayah di Indonesia

f_i : Jumlah penduduk daerah kab/kota di tiap provinsi di Indonesia

n : Jumlah penduduk di tiap provinsi di Indonesia

Kriteria hasil yang digunakan antara lain Syafrizal (1997) dalam (Waluyaningsih & Setiawan, 2020) guna menilai tinggi rendahnya ketimpangan.

Indeksnya > 1 : Begitu tinggi

Indeksnya 0.7 s.d. 1 : Tinggi

Indeksnya 0.4 s.d. 0.69 : Sedang

Indeksnya < 0.39 : Rendah

Metode Analisis

Metode analisis riset ini yaitu metode regresi data panel. Model regresinya yakni:

$$KE_{it} = \beta_0 + \beta_1 INV_{it} + \beta_2 PE_{it} + \beta_3 JLN_{it} + \beta_4 DEM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

KE : Ketimpangan ekonomi

INV : Investasi

PE : Pertumbuhan ekonomi

JLN : Infrastruktur jalan

DEM : Demokrasi

β_0 : Konstanta

$\beta_{1,2,3,4}$: Koefisien regresi

i : 1,2,...,n, yaitu data silang

t : 1,2,...,n, yaitu data runtut waktu

ε : Error term

Data penelitian ini yaitu data panel guna menganalisis ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia. Sebelum melakukan estimasi model, terdapat beberapa uji perlu dilakukan guna menentukan model tercocok (Gujarati, 2009). Uji Chow dilakukan guna memutuskan CEM atau FEM. Uji Hausman guna memutuskan FEM atau REM. Uji Breusch-Pagan LM guna memilih CEM atau REM.

Uji asumsi klasik guna memeriksa data penelitian sudah mencukupi asumsi - asumsi klasik supaya hasil analisisnya dapat valid. Uji normalitas ini guna memeriksa apakah data terdistribusi normal, metode mencari tahu residual terdistribusi normal yaitu metode Jarque-Bera Test dan metode grafik. Uji multikolonieritas dilakukan guna menganalisis korelasinya variabel bebas, jika nilai koefisien korelasinya $< 0,80$ artinya tak adanya masalah multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas menguji apakah errornya regresi memiliki varian yang konstan dan tidak saling berhubungan antar satu pengamatan dengan pengamatan lainnya.

Pengujian hipotesis guna mencari tahu apakah hasil penelitian sudah valid dan data yang digunakan akurat. Uji t guna meninjau variabel bebas secara individual berpengaruh signifikan pada variabel terikat. Uji F guna mencari tahu apakah secara keseluruhan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Uji (R^2) adalah ukuran seberapa besarnya variabel bebas bias menjabarkan variabel terikat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 1 Uji Statistik Deskriptif

	KE	INV	PE	JLN	DEM
Mean	0.569510	2.91E+13	4.081422	15951.07	75.81113
Maximum	2.520000	2.16E+14	22.94000	42521.00	89.21000
Minimum	0.140000	3.45E+11	-15.74000	4006.000	57.62000
Std. Dev.	0.406637	3.80E+13	4.11565	10021.76	5.603641
Observations	204	204	204	204	204

Sumber : Eviews 12 (data diolah)

Hasil uji statistik deskriptif variabel ketimpangan ekonomi memperlihatkan nilai mean 0.56 dan nilai standar deviasi 0.41. Nilai maksimumnya 2.52 yang terjadi di Provinsi Papua Barat tahun 2023, lalu nilai minimumnya 0.14, ada di Provinsi Gorontalo tahun 2019.

Hasil uji statistik deskriptif variabel investasi memperlihatkan nilai mean Rp.29.100 triliun rupiah dan nilai standar deviasi Rp3.80 triliun. Nilai maksimumnya Rp.216.000 triliun rupiah di Jawa Barat pada tahun 2023, sedangkan nilai minimum sebesar Rp.345 milyar rupiah di Sulawesi Barat tahun 2020.

Hasil uji statistik deskriptif variabel pertumbuhan ekonomi memperlihatkan nilai mean 4.08% dan nilai standar deviasi 4.11. Nilai maksimum sebesar 22.94 % di Maluku Utara tahun 2022, sedangkan nilai minimum sebesar -15.74 % di Papua tahun 2019.

Hasil uji statistik deskriptif variabel infrastruktur jalan memperlihatkan nilai mean 15951.07 km dan nilai standar deviasi 10021.76. Nilai maksimumnya 42521 km ada di Jawa Timur pada tahun 2021, sedangkan nilai minimum sebesar 4006 km, ada di Kalimantan Utara 2018.

Hasil uji statistik deskriptif variabel demokrasi menunjukkan nilai mean 75.81 dan nilai standar deviasi 5.60. Nilai maksimumnya 89.21, ada di DKI Jakarta tahun 2020, sedangkan nilai minimum sebesar 57.62 di Papua Barat tahun 2019.

Pemilihan model Regresi

1. Uji Chow

Tabel 2 Uji Chow

Effects Test	Stat	d.f.	Prob.
Cross-section F	313.105949	(33,166)	0.0000

Sumber : Eviews 12 (data diolah)

Berdasar tabel 2 uji *chow* didapat prob. $0.000 < 0.05$ olehnya H_0 ditolak artinya FEM lebih tepat.

2. Uji Hausman

Tabel 3 Uji Hausman

Test Sum.	Chi-Sq.		Prob.
	Stat	Chi-Sq. d.f.	
Cross-section random	30.139461	4	0.0000

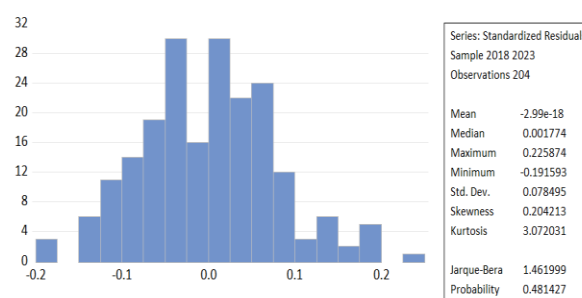
Sumber : Eviews 12 (data diolah)

Berdasar tabel 3 uji hausman didapat prob. $0.0000 < 0.05$ olehnya H_0 ditolak artinya FEM lebih tepat.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Gambar 3 Uji Normalitas



Sumber : Eviews 12 (data diolah)

Berdasar gambar 3 uji normalitas di peroleh probability JB $0.481427 > 0.05$, artinya secara statistik data riset ini terdistribusinya normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Uji Multikolinieritas

	INV	PE	JLN	DEM
INV	1.00000	0.16383	0.28515	0.24734
PE	0.16383	1.00000	-0.04238	-0.02408
JLN	0.28515	-0.04238	1.00000	-0.06568
DEM	0.24734	-0.02408	-0.06568	1.00000

Sumber : Eviews 12 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4 uji Multikolinieritas diperoleh nilai korelasi antara inv dan pe yakni 0.163825. Nilai korelasi inv dan jln yakni 0.285146. Nilai korelasi inv dan dem sebesar 0.247338. Nilai korelasi pe dan jln sebesar -0.042377. Nilai korelasi pe dan dem -0.02408. Nilai korelasi jln dan dem sebesar -0.06568. Dapat diketahui bahwa semua nilai korelasi berada < 0.80 artinya variabel bebas yang tak terkena multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Prob
INV	0.18650
PE	0.13100
JLN	0.75020
DEM	0.62380

Sumber : Eviews 12 (data diolah)

Berdasar tabel 5 uji heteroskedastisitas diperoleh nilai signifikansi probabilitas variabel inv = 0.18650, pe = 0.13100, jln = 0.75020, dan dem = 0.62380 > 0.05 artinya secara statistik data terhindar dari gejala heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk pengujian dengan model regresi linier berganda.

Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6 Uji t

Variabel	t-stat	t-tab	prob
INV	3.690793	1.97196	0.0141
PE	2.860354	1.97196	0.0354
JLN	-2.605283	1.97196	0.0479
DEM	4.444474	1.97196	0.0067

Sumber : Eviews 12 (data diolah)

Berdasar tabel 6 uji t, variabel memiliki nilai t-hitung 3.690793 > 1.97196 t-tabel dan prob. 0.0141 (< 0.05). Olehnya, investasi berpengaruh signifikan pada ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai t-hitung 2.860354 > 1.97196 t-tabel dan prob. 0.0354 (< 0.05). Olehnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan pada ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia. Variabel infrastruktur jalan bernilai t-hitung 2.605283 > 1.97196 t-tabel dan prob. 0.0479 (< 0.05). Olehnya disimpulkan infrastruktur berpengaruh signifikan pada ketimpangan ekonomi

wilayah di Indonesia. Variabel demokrasi bernilai t-hitung 4.444474 > 1.97196 t-tabel dan prob. 0.0067 (< 0.05). Olehnya demokrasi berpengaruhnya signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 7 Uji F

<i>df</i> ;(n-k-1)	F-stat	F-tab (n-k-1)	Prob.
4 ; 199	427.2465	2.42	0.00000

Sumber : Eviews 12 (data diolah)

Berdasar tabel 7 uji F didapat nilai F-hitung 466.1552 > 2.42 F-tabel dan prob. 0,0000 (< 0.05). Secara simultan variabel investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan dan demokrasi bersama-sama berpengaruhnya signifikan pada ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia.

3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8 Uji R²

R-Squared	Adjusted R-squared
0.989608	0.987292

Sumber : Eviews 12 (data diolah)

Berdasar tabel 8 uji (R²) memperlihatkan nilai 0.989608 atau 98.96 persen yang menunjukkan besar pengaruh variabel investasi, pertumbuhan ekonomi, insfranstruktur jalan dan demokrasi terhadap ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia, sedangkan sisanya 1.04% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Hasil Persamaan Regresi Data Panel

Berdasar pemilihan model regresi, maka model terbaik yaitu FEM. Berikut hasil regresinya:

Tabel 9 Hasil Regresi FEM

Variabel	Koef.	Std.Error	t-Stat.	Prob.
C	0.629207	0.077374	8.131972	0.0005
INV	7.10E-16	1.92E-16	3.690793	0.0141
PE	0.000634	0.000222	2.860354	0.0354
JLN	-1.33E-05	5.12E-06	-2.605283	0.0479
DEM	0.001713	0.000385	4.444474	0.0067
Effect Specification				
R-Square	0.989608		F-statistik	427.2465
Adjusted R-Square	0.987292		Prob(F-statistik)	0.000000

Sumber : Eviews 12 (data diolah)

Berdasar tabel 9 di atas, olehnya persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$KE_{it} = 0.629207 + 7.10E-16 INV_{it} + 0.000634 PE_{it} - 1.33E-05 JLN_{it} + 0.001713 DEM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Berdasarkan persamaan regresi maka apabila konstanta 0.629207 berarti bila investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan dan demokrasi bernilai nol atau nilainya tetap maka ketimpangan ekonomi memiliki nilai sebesar 0.629207. Nilai koefisien regresi investasi sebesar $7.10E-16$ menunjukkan adanya hubungan positif dari investasi dan ketimpangan ekonomi, bila investasi terdapat peningkatan Rp1 T olehnya ketimpangan ekonomi naik Rp $7.10E-16$. Nilai koefisien regresinya pertumbuhan ekonomi 0.000634 berarti ada hubungan positifnya pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi, artinya bila pertumbuhan ekonomi terdapat peningkatan 1% olehnya ketimpangan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 0.000634. Nilai koefisien regresi infrastruktur jalan $-1.33E-05$ memperlihatkan hubungan negatif infrastruktur jalan dan ketimpangan ekonomi, artinya apabila infrastruktur jalan meningkat 1 km olehnya ketimpangan ekonomi turun $-1.33E-05$. Nilai koefisien regresi demokrasi 0.001713 berarti bila demokrasi meningkat 1 olehnya ketimpangan ekonomi naik 0.001713.

Pembahasan

1. Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Temuan ini memperlihatkan investasi berpengaruh signifikan pada ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia. Hal ini tampak dari nilai prob. $0.0141 < 0.05$ artinya investasi ialah satu determinan penyebab ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia.

Hasil riset ini sejalanannya dengan Rizal Syaifudin,dkk (2024) dimana PMDN dan PMA berpengaruh signifikan pada ketimpangan ekonomi wilayah. Nurfifah et al., (2022) pun menemukan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Penelitian oleh Azim et al., (2022) menunjukkan investasi asing berpengaruh positif signifikan pada ketimpangan.

Secara teoritis, hasil riset ini dijelaskan menggunakan teori perkembangan wilayah oleh Gunnar Myrdal tahun 1957. Myrdal mengemukakan bahwa perbedaan dalam tingkat investasi antar wilayah dapat memperburuk ketimpangan pembangunan (*backwash effect*). *Backwash effect* terjadi ketika wilayah yang lebih berkembang menarik sumber daya termasuk investasi dari wilayah lain yang kurang berkembang sehingga memperlebar ketimpangan pembangunan antar wilayah. Berdasarkan teori ini, wilayah yang lebih maju secara ekonomi memiliki keunggulan yang membuatnya lebih mudah menarik investasi. Keunggulan ini meliputi permintaan yang lebih tinggi, infrastruktur yang baik, potensi sumber daya yang memadai, kemudahan birokrasi, kepastian informasi, dll. Sebaliknya, wilayah yang tertinggal menghadapi kesulitan karena rendahnya daya beli masyarakat, kualitas sdm yang rendah, infrastruktur yang kurang memadai dan terbatasnya peluang yang ada sehingga sulit untuk menarik investasi. Di Indonesia, investasi condong berpusat di wilayah yang lebih berkembang secara ekonomi seperti di pulau Jawa, sementara wilayah diluar pulau Jawa khususnya kawasan Indonesia Timur masih tertinggal dalam arus investasi.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Temuan ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan pada ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia. Hal ini tampak dari prob. $0.0354 < 0.05$, artinya pertumbuhan ekonomi ialah faktor penyebab ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia.

Hasil penelitian sejalanannya bersama Tayeb et al. (2022) dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan pada ketimpangan pembangunan ekonomi. Penelitian Ferdian et al. (2024) menemukan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan pada ketimpangan pembangunan. Royan et al., (2019) pun menyebut pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan pada ketimpangan.

Temuan ini dapat dijelaskan dalam hipotesis Kuznets yang mengemukakan hubungannya pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan berbentuk kurva U terbalik (Saputra, 2024). Menurut Kuznets, pada tahap pertama pembangunan ekonomi, ketimpangan condong meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi namun setelah mencapai titik tertentu ketimpangan akan mulai menurun. Sehingga di jangka pendek ada hubungan positifnya pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan tetapi dalam jangka panjang hubungannya berubah menjadi negatif. Hal ini sebab ada transfer tenaga kerja dari sektor tradisional berproduktivitas rendah ke sektor modern berproduktivitas

modern.

Temuan ini juga sejalan dengan konsep divergensi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memperlebar kesenjangan antardaerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haslinda and Arapi (2024) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan konvergensi melainkan divergensi yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi justru meningkatkan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Ketika suatu wilayah berkembang pesat maka wilayah tersebut biasanya lebih menggaet investasi, sumber daya, dan teknologi yang mempercepat pembangunan ekonomi. wilayah yang memiliki infrastruktur baik dan akses ke pasar akan terus tumbuh, menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar. Sebaliknya, wilayah yang tertinggal kesulitan untuk mengikuti perkembangan ini karena terbatasnya infrastruktur, rendahnya investasi dan akses ke pasar.

3. Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Temuan ini memperlihatkan infrastruktur jalan berpengaruh signifikan pada ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia. Hal ini tampak dari prob $0.0479 < 0.05$ artinya infrastruktur jalan ialah faktor penyebab ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia.

Hasil riset ini sejalan bersama penelitiannya Azim et al. (2022) dimana infrastruktur jalan berpengaruh signifikan pada ketimpangan antar daerah di Indonesia. Penelitian oleh Abdullah, (2023) menunjukkan infrastruktur jalan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan. Namun, riset ini tak sejalan bersama Iqbal et al., (2019) menunjukkan infrastruktur jalan berpengaruh negatif tak signifikan pada ketimpangannya pembangunan ekonomi.

Jalan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama pada wilayah yang terletak jauh dari sentra kegiatan ekonomi. Dengan adanya jalanan yang baik maka produktivitas juga aksesibilitas barang antar daerah bisa meningkat sehingga mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah yang menjadi pusat kegiatan dengan wilayah yang menghasilkan produk pertanian. Panjang jalan berpengaruh guna mengurangi ketimpangan sebab distribusi barang, jasa dan orang akan lebih mudah dengan adanya ketersediaan infrastruktur jalan (Iqbal et al., 2019). Interaksinya antar wilayah akan lebih lancar jika kondisi jalannya baik akan mempermudah mobilisasi faktor atau hasil produksi serta mendorong terbentuknya sentra pertumbuhan ekonomi baru yang bias memperbanyak hasil produksi.

4. Pengaruh Demokrasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Temuan ini memperlihatkan demokrasi berpengaruh secara signifikan pada ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia. Hal ini tampak dari prob. $0.0067 < 0.05$ artinya demokrasi ialah faktor penyebab ketimpang ekonomi wilayah di indonesia.

Hasil penelitian sejalan degan temuan Wagle (2009) yang menyatakan bahwa demokrasi meningkatkan ketimpangan ekonomi. Meskipun demokrasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tidak langsung mengurangi ketimpangan dikarenakan adanya kecenderungan kelompok elit ekonomi yang memanfaatkan demokrasi untuk memperkuat posisi mereka dalam struktur ekonomi dan politik. Dalam banyak kasus, proses demokratisasi malah memberi ruang lebih luas bagi kelompok elit dan berpengaruh untuk mengendalikan kebijakan ekonomi sehingga ketimpangan ekonomi wilayah semakin melebar.

Secara teoritis, hasil penelitian ini dijelaskan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Acemoglu dan Robinson (2014) dalam (Muttaqin, 2017). Dalam kajiannya, Acemoglu dan Robinson menekankan bahwa institusi ekonomi yang ekstraktif merupakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan. Institusi ekstraktif adalah sistem di mana akses ekonomi dan politik didominasi oleh kelompok tertentu, sehingga pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir pihak dan memperburuk ketimpangan ekonomi wilayah. Meskipun ada potensi pertumbuhan ekonomi namun keuntungan yang diperoleh lebih banyak dinikmati oleh segelintir elit, sementara sebagian besar masyarakat justru tertinggal. Hal ini menyebabkan ketimpangan ekonomi antar wilayah semakin tajam.

Selain itu, tingginya tingkat korupsi di Indonesia menjadi penghambat utama efektivitas demokrasi dalam menurunkan ketimpangan ekonomi wilayah. secara formal demokrasi telah

diterapkan, namun lemahnya integritas birokrasi dan masih maraknya praktik korupsi pada berbagai level pemerintah justru melemahkan kapasitas negara dalam menjalankan fungsi kontrol dan distribusi keadilan dalam pembangunan. Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (CPI) skor korupsi di Indonesia menunjukkan tren penurunan, pada tahun 2018 dengan skor 38 (peringkat 89 dari 180 negara) dan pada tahun 2023 menjadi skor 34 (peringkat 115 dari 180 negara), jauh dari skor ideal 100 yang mencerminkan kondisi bebas korupsi. Skor yang rendah ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah masih mudah dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu yang bukan untuk kepentingan masyarakat umum. Ketika korupsi masih terjadi di banyak sektor pemerintahan maka demokrasi yang ada hanya sebatas prosedur tanpa adanya perubahan yang nyata. Akibatnya, sumber daya ekonomi tidak terdistribusi secara merata dan memperparah ketimpangan antarwilayah. Tanpa adanya upaya pemberantasan korupsi, demokrasi hanya akan menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan kelompok elit bukan sebagai sarana mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Sesuai temuan riset, olehnya disimpulkan investasi berpengaruh signifikan pada ketimpangan ekonomi wilayah. Hal ini memperlihatkan perbedaan dalam tingkat investasi antar wilayah cenderung memperbesar ketimpangan ekonomi antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan pada ketimpangan ekonomi wilayah, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi biasanya berpendapatan lebih tinggi dibanding yang pertumbuhan ekonominya rendah. Infrastruktur jalan berpengaruh signifikan pada ketimpangan ekonomi wilayah, dengan adanya infrastruktur jalan maka produktivitas dan aksesibilitas barang antar wilayah akan meningkat sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Demokrasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi, institusi ekonomi yang ekstraktif menjadi hambatan untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang disebabkan akses ekonomi dan politik lebih didominasi oleh kelompok tertentu sehingga pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir pihak dan memperburuk ketimpangan ekonomi wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian, ada sejumlah saran guna menurunkan ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia yaitu Pemerintah Daerah perlu merumuskan kebijakan untuk meningkatkan arus investasi dan distribusinya merata di seluruh wilayah. Pemerintah pusat harus mengoptimalkan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan juga menstimulus pertumbuhan ekonomi merata. Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, terutama di daerah tertinggal, untuk memperbaiki aksesibilitas. Pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, kualitas layanan publik, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi wilayah. Hasil penelitian diupayakan menjadi referensi penelitian selanjutnya yang akan menganalisis lebih dalam terkait hubungannya investasi, pertumbuhan ekonominya dan demokrasi terhadap ketimpangan ekonominya wilayah di Indonesia. Selain itu, Peneliti berikutnya disarankan memperluas penelitian dengan mempertimbangkan determinan lain yang memengaruhi ketimpangan ekonomi wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. H. (2023). *Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi (Studi : 10 Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2022)*.
- Anwar, A. A., Rorong, I. P. F., & Tolosang, K. D. (2023). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 85–96.
- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Ginanjar, R. A. F. (2022). *Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi*

Antarprovinsi Di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–16.

Bappedda. (2017). *Pembangunan Ekonomi*.

<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-13>

Fahma, B. A., & Hendarto, R. M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2020. *Diponegoro Journal Of Economics*, 11(2), 67–81.

Ferdian, A., Azhar, Z., & Riani, N. Z. (2024). Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarprovinsi Di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan (MedRep)*, 1(1), 18–26. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i1.23>

Gujarati, D. N. (2009). Basic Econometrics. In *Douglas Reiner*.

Haslinda, & Arapi, R. (2024). Analisis Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Kritis*, 8(2), 111–133.

Iqbal, M., Rifin, A., & Juanda, B. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Provinsi Aceh. *Totaloka*, 21(1), 75–84.

Karim, T. Z., Harahap, H. H., & Mardalena, M. (2023). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah Dalam Upaya Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jambi. *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, 4(2). <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jbfe>

Muttaqin, Z. (2017). *Review Buku Mengapa Negara Gagal-Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan Karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson*.

Nurfifah, R., Walewangko, E. N., & Masloman, I. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Ketimpangan Kota-Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmu Efisiensi*, 22(5), 25–36. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/42318>

Royan, M., Riyanto, W. H., & Nuraini, I. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 3(3), 365–375. <https://doi.org/10.22219/jie.v3i3.8993>

RPJM. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019*. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/114/1/012081>

RPJMN. (2019). *Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. In *Kementerian perencanaan pembangunan nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Saputra, D. S. (2024). *Ketimpangan Pendapatan Di Kawasan Indonesia Timur Dengan Pembuktian Hipotesis Kuznets (Issue April)*.

Sjafrizal. (2014). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Rajawali.

Sudarmadji. (2022). *Buku Ajar Analisis Investasi* (L. M. Samryn (ed.)). Tanri Abeng University Press.

Syaifudin, R., Salman Alfarisi, M., Stephanie Regina Putri, G., Abdul Jabbar, M., Malik, A., & Zulfa, F. N. (2024). Determinan Ketimpangan Wilayah di Indonesia Tahun 2012-2022: Pendekatan Analisis Panel Dinamis. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 5(2), 129–137. <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i2.5143>

Tayeb, I., Anwar, C., & Suparman. (2022). Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2000-2020. *Jurnal Katalogis*, 10(1), 24–34. <http://jurnal.pasca.untad.ac.id/index.php/katalogis/index>

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development*.

Wagle, U. R. (2009). Inclusive democracy and economic inequality in South Asia: Any discernible link? *Review of Social Economy*, 67(3), 329–357. <https://doi.org/10.1080/00346760902908617>

Waluyaningsih, V. D., & Setiawan, A. H. (2020). Analisis Ketimpangan Pendapatan Antarwilayah di Kawasan Kedungsepur, Barlingmascakeb dan Subosukawonosraten Periode 2008-2017. *Diponegoro Journal Of Economics*, 9(2006), 123–134.

Wike, R., Fagan, M., Huang, C., Clancy, L., & Lippert, J. (2025). *Economic Inequality Seen as Major Challenge Around the World*. 1-76.